

## AFILIASI TANPA PARTISIPASI KEDEKATAN PARTAI POLITIK DAN KESEDIAAN MENJADI PENGAWAS PEMILU DI D.I YOGYAKARTA

**Satria Aji Imawan**

Universitas Diponegoro  
satriaimawan@undip.ac.id

**Adrinoviarini**

Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia  
ririn@unusia.ac.id

### Abstrak

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, dinamika politik sangat kuat tidak hanya terkait dengan kontestasi peserta pemilu, tetapi juga pengisian jabatan komisioner-komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Fenomena ini menarik untuk menelaah apakah pengisian jabatan politik komisioner-komisioner turut mendorong masyarakat yang berafiliasi kuat atau merasa dekat dengan partai politik untuk turut berpartisipasi sebagai pengawas pemilu. Untuk menjawab hal tersebut, tulisan singkat ini hendak menjawab pertanyaan sejauh mana kedekatan pada partai politik akan mendorong seseorang untuk menjadi pengawas pemilu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan November 2022. Temuan menunjukkan hal yang menarik, ketika seseorang memiliki kedekatan dengan partai politik, hal tersebut mendorong seseorang untuk terlibat menjadi pengawas pemilu. Studi kasus di D.I.Y menjadi penting, mengingat provinsi ini memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hal ini penting mengingat IPM tinggi seharusnya menunjukkan bahwa kelas sosial dalam masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan daerah lain. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan penjelasan apa faktor apa yang mendorong keterlibatan seseorang sebagai pengawas pemilu. Tentu hasil dalam tulisan ini memiliki kekurangan, terutama terkait dengan faktor-faktor lain yang barangkali belum masuk dalam uji regresi. Pada aspek yang lebih praktis, diharapkan tulisan ini dapat menginspirasi kajian-kajian sejenis di masa mendatang.

**Kata kunci:** Afiliasi partai politik, Pengawas pemilu, Demokrasi

### Abstract

Approaching the 2024 general election (Pemilu), political dynamics are powerful not only related to the contestation of election participants but also the filling of the positions of commissioners of the Election Supervisory Agency (BAWASLU). This phenomenon is interesting to examine whether filling the political positions of commissioners also encourages people who are strongly affiliated or feel close to political parties to participate as election observers. In order to answer this, this short article aims to answer the question of to what extent closeness to a political party encourages someone to become an election observer. This article uses Kolasse survey data in the Special Region of Yogyakarta (D.I.Y) in November 2022. The findings show that when someone is close to a political party, this encourages someone to become involved as an election observer. The case study in D.I.Y is essential, considering that this province has a high Human Development Index (HDI) level. This aspect is essential, considering that a high HDI should indicate that the social class in that society is better than in other areas. Hopefully, this short article will explain the factors that encourage someone's involvement as an election observer. Of course, the results in this paper have shortcomings, especially those related to other factors that may not have been included in the regression test. From a more practical aspect, hopefully, this article can inspire similar studies in the future.

**Keywords:** Political parties affiliation, Election supervisory, Democracy

---

## **Pendahuluan**

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 akan menjadi pemilu langsung yang kelima kalinya pasca reformasi tahun 1998. Dalam perjalanan pemilu di Indonesia, salah satu momen penting dalam pelaksanaan pemilu ada ketika Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) hadir untuk mengawasi jalannya pemilu, termasuk mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Ja'far, 2018; Haryanti & Pujilestari, 2019). Salah satu fokus utama dari kehadiran BAWASLU adalah agar integritas pemilu dapat terjaga (Norris et al., 2020). Integritas pemilu merupakan salah satu konsep penting dalam negara demokrasi, mengingat sebuah negara sangat mungkin untuk melakukan pemilu, tetapi pelaksanaan pemilu di negara tersebut tidak demokratis.

Hal ini tentu saja tidak menafikan beberapa persoalan di dalam pemilu di Indonesia, mulai dari persoalan politik dinasti (Fitriyah, 2020; Widyastuti et al., 2022), persoalan relasi patron-klien dalam politik di Indonesia (Simandjuntak, 2012; Ansyari et al., 2019), hingga dominasi oligarki kelompok ekonomi (Romli, 2019; Sumarni, 2023). Persoalan-persoalan ini yang perlu untuk diperhatikan, mengingat bagaimanapun juga faktor-faktor tersebut yang menentukan apakah warga negara berdaya. Tanpa ada kebebasan atau otonomi individu, maka akan sulit untuk dapat mendorong partisipasi politik warga negara, termasuk di antaranya di dalam pemilu.

Tulisan singkat ini hendak membahas faktor kedekatan warga negara terhadap partai politik dan kemauan dari warga negara untuk menjadi pengawas pemilu, 2020. Kajian terkait hal ini belum banyak dilakukan. Kajian yang pernah dilakukan dengan topik terkait pengawas pemilu antara lain mengenai definisi pengawas pemilu (Kartini, 2017), peran KPU dalam pengawasan pemilu (Marzuki, 2008), program penguatan pengawasan pemilu (Primadi et al., 2019), konflik gender dalam pengawasan pemilu (Daryono et al., 2020), dan prospek kelembagaan BAWASLU untuk meningkatkan partisipasi warga negara (Surbakti & Fitrianto, 2015; Imawan & Ramadhan, 2021). Belum terdapat tulisan yang membahas keterkaitan antara kedekatan warga negara terhadap partai politik dan keinginan untuk berpartisipasi sebagai pengawas pemilu.

Tulisan singkat ini hendak membawa diskusi pada dimensi yang berbeda, terutama mengingat Indonesia pernah mengalami periodisasi polarisasi politik pada pemilu 2014 (Hayat & Nurhakki, 2022; Nashrullah, 2023) dan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 (Ardipandanto, 2017; Prayogi, 2019). Dalam kajian mengenai polarisasi, salah satu kunci penting dalam kajian tersebut adalah polarisasi mendorong partisipasi (Crepaz, 1990; Baldassarri &

Bearman, 2007). Apabila faktor polarisasi menjadi sangat penting, maka polarisasi pada pemilu 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017 penting untuk menjelaskan konteks pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Patut diingat, bahwa pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua, tidak terdapat oposisi yang berarti. Oleh karena itu, meski polarisasi barangkali dapat menjadi faktor apakah seseorang berminat untuk terlibat sebagai pengawas pemilu, akan tetapi faktor tersebut tidaklah dimasukkan ke dalam model regresi dikarenakan unifikasi politik pada periode kedua pemerintahan.

Teorisi lain menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang kuat akan mendorong partisipasi politik bagi warga negara (Wass, 2007; Kudrnác, 2015). Dalam konteks ini, partisipasi politik yang hendak diuji adalah partisipasi untuk turut mengawal pemilu, sedangkan faktor penjelasnya adalah afiliasi terhadap partai politik. Tulisan singkat ini hendak menjawab pertanyaan sejauh mana kedekatan pada partai politik akan mendorong seseorang untuk menjadi pengawas pemilu? Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan November 2022.

Studi kasus di D.I.Y menjadi penting, mengingat provinsi ini memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hal ini penting mengingat IPM tinggi seharusnya menunjukkan bahwa kelas sosial dalam masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan daerah lain. Hipotesis ( $H_1$ ) untuk tulisan ini adalah bahwa terdapat hubungan antara afiliasi partai terhadap partai politik ke partisipasi untuk mengawal pemilu, semakin tinggi kedekatan dengan partai politik maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk terlibat sebagai pengawas pemilu.

## Metode Penelitian

Analisa dalam penelitian ini menggunakan Ordinary least squares (OLS), data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data survei yang dilakukan oleh Kolaborasi Strategis (Kolasse) pada di D.I.Y pada bulan November 2022. Pengambilan data dilakukan secara tatap muka (*face to face interview*) dengan metode pengacakan yang dilakukan secara bertingkat (*multistage random sampling*) terhadap 500 responden. Pengambilan data dilakukan sejak tanggal 14 hingga 23 November 2022. Pengecekan keabsahan data dilakukan secara acak terhadap 20 persen sampel.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah “kesediaan menjadi pengawas pemilu” yang merupakan variabel Index berasal dari empat pertanyaan. Keempat pertanyaan memiliki pertanyaan

umum yakni “Berkaitan dengan pemilu 2024 mendatang, apakah Anda bersedia untuk berpartisipasi dalam beberapa hal berikut ini?” dengan empat variasi pertanyaan yakni “Menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS?”, “Menjadi petugas hitung cepat di TPS saat pemilu untuk sebuah lembaga riset?”, “Menjadi pemantau independen di TPS saat pemilu?”, dan “Menjadi saksi di TPS untuk calon yang didukung?”.<sup>1</sup> Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah “kedekatan partai politik” dengan konstruksi pertanyaan “Dengan partai politik apakah Anda merasa paling dekat?”.<sup>2</sup> Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam regresi, yakni tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, usia, penilaian pada demokrasi, dan intensitas diskusi politik.<sup>3</sup> Berikut ini model untuk analisa statistik dalam artikel singkat ini.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 * \text{Kedekatan dengan Partai Politik} + \beta_2 * \text{Pendapatan} + \beta_3 * \text{Pendapatan} \\ + \beta_4 * \text{Pendidikan} + \beta_5 * \text{Usia} + \beta_6 * \text{Penilaian terhadap demokrasi} + \beta_7 * \text{Intensitas} \\ \text{diskusi politik} + \epsilon$$

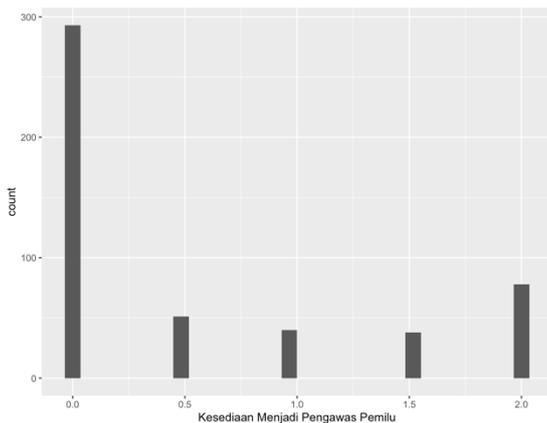
Distribusi untuk variabel independen dan dependen dapat terlihat pada figur 1 dan figur 2. Pada figur 1 (variabel dependen) terlihat bahkan setelah terbentuk variabel indeks, bahwa mayoritas dari responden tidak bersedia untuk menjadi pengawas pemilu, sedangkan variasi kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu terlihat dari angka 0.5 hingga skala 2. Untuk variabel independen (figur 2) terlihat bahwa hasil dari biner variabel, bahwa mayoritas responden menyatakan dekat dengan partai politik, dibandingkan tidak dekat dengan partai politik. Berdasarkan data deskriptif ini, kita

<sup>1</sup> Pada pertanyaan ini, opsi jawaban berupa biner yakni 1 untuk opsi Ya, bersedia, dan 2 untuk opsi Tidak bersedia. Dalam analisa statistik ini, opsi kami ubah dengan opsi 1 kami beri kode 1, dan opsi 2 kami beri kode 0 untuk setiap pertanyaan, sebelum kami gabungkan menjadi variabel indeks.

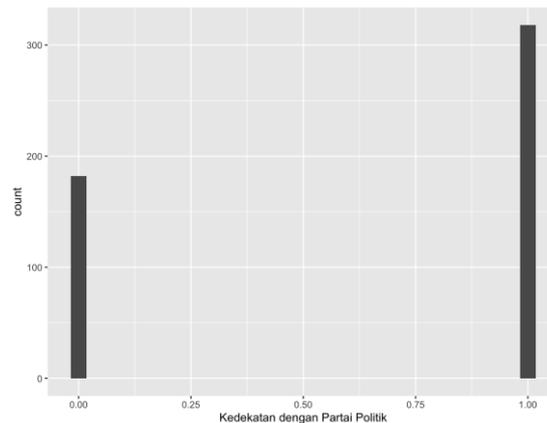
<sup>2</sup> Pada pertanyaan ini, opsi kami ubah menjadi biner dengan 0 untuk opsi tidak dekat dengan partai politik dan 1 untuk opsi dekat dengan partai politik. Adapun opsi jawaban untuk pertanyaan ini adalah (1) PKB, (2) Gerindra, (3) PDI-P, (4) Golkar, (5) Nasdem, (6) Garuda, (7) PKS, (8) Perindo, (9) PPP, (10) PSI, (11) PAN, (12) Hanura, (13) Demokrat, (14) PBB, (15) Lainnya/Opsi lainnya, dan (16) Tidak dekat dengan partai politik.

<sup>3</sup> Untuk variabel penilaian terhadap demokrasi dan intensitas diskusi politik, opsi jawaban kami beri kode secara terbalik dengan nilai 1 untuk penilaian buruk terhadap kualitas demokrasi dan 4 untuk penilaian baik terhadap kualitas demokrasi. Adapun nilai 1 untuk intensitas rendah dalam mendiskusikan persoalan politik dan 4 untuk intensitas tinggi dalam mendiskusikan persoalan politik.

dapat melihat bahwa mayoritas masyarakat D.I.Y tidak terlalu tertarik untuk terlibat sebagai pengawas pemilu, tetapi sebagian besar dari masyarakat merasa dekat dengan partai politik. Paling tidak hasil dari data deskriptif menunjukkan bahwa komitmen untuk menjadi pengawas pemilu hanya ada pada segelintir orang yang memiliki kedekatan politik, termasuk terutama dengan partai



Figur 1. DV: Kesiadaan Menjadi Pengawas Pemilu



Figur 2. IV: Kedekatan dengan Partai Politik

politik.

Pada model statistik dalam penelitian ini, variabel kontrol penting untuk dimasukkan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari variabel lain yang akan mempengaruhi variabel dependen. Pada banyak penelitian sosial dan politik, variabel demografi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, dan usia cukup berpengaruh sebagai gambaran kelas sosial.<sup>4</sup> Upaya untuk meminimalkan pengaruh variabel lain yang tidak terdeteksi terlihat pada variabel penilaian demokrasi dan intensitas diskusi politik.<sup>5</sup> Adapun deskriptif statistik untuk variabel-variabel dalam penelitian ini dapat terlihat dalam tabel 1 berikut ini.

<sup>4</sup> Pada banyak penelitian sosial politik, variabel demografi menjadi penting untuk dimasukkan dalam model, terutama mengingat kesiadaan menjadi pengawas pemilu maupun afiliasi partai politik sangat mungkin dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, maupun usia. Ketiga variabel tersebut dapat menjadi indikator atau gambaran dari kelas sosial.

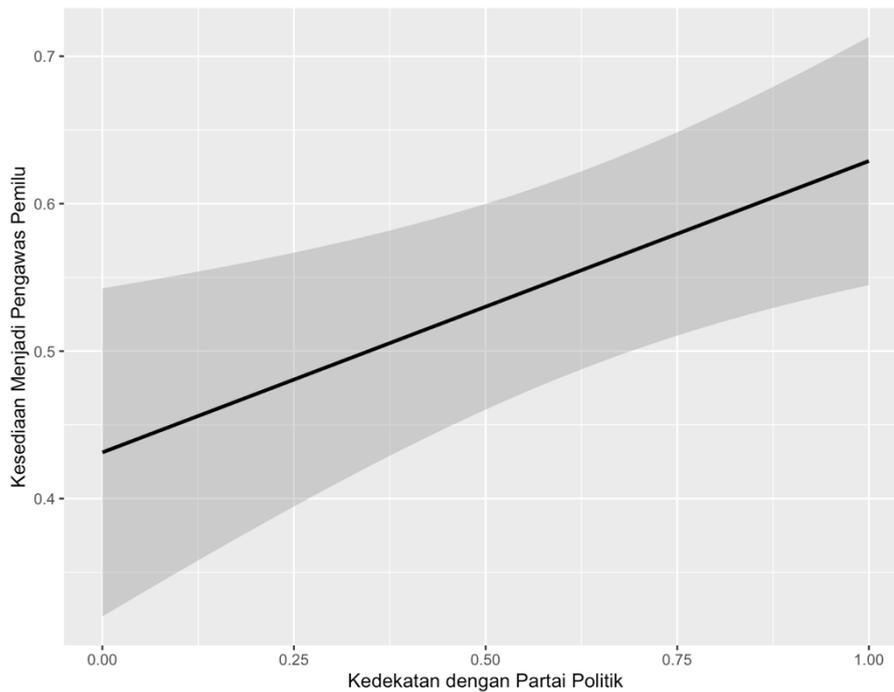
<sup>5</sup> Variabel penilaian terhadap demokrasi menjadi variabel kontrol yang penting, mengingat seseorang yang menilai kualitas demokrasi baik, maka kita dapat mengasumsikan bahwa seseorang tersebut akan berpartisipasi dalam kegiatan politik sehari-hari, termasuk menjadi pengawas pemilu. Kita dapat melihat dari aspek sebaliknya, bahwa ketika seseorang menilai buruk terhadap pelaksanaan demokrasi, kita dapat mengasumsikan bahwa seseorang tersebut akan tidak banyak terlibat dalam kegiatan demokrasi sehari-hari. Hal tersebut berlaku pula pada intensitas diskusi politik, semakin seseorang memiliki intensitas diskusi politik, kita dapat mengasumsikan bahwa seseorang tersebut akan semakin aktif terlibat politik, pun demikian sebaliknya.

**Tabel 1. Deskriptif Statistik**

Variabel	Mean	Median	Standard Deviation	Min	Max
Menjadi Pengawas Pemilu	0.55	0	0.76	0	2
Afiliasi Partai Politik	0.63	1	0.48	0	1
Tingkat Pendapatan	1.79	1	0.98	1	5
Tingkat Pendidikan	4.40	5	1.33	1	8
Usia	2.90	3	0.88	1	4
Penilaian Demokrasi	2.83	3	0.49	1	4
Diskusi politik	3.57	3	0.97	1	5

### **Pembahasan**

Apabila kita melihat analisa bivariate (figur 3) kita dapat melihat bahwa terdapat relasi positif antara kedekatan dengan partai politik dengan kesiadaan untuk menjadi pengawas pemilu. Artinya, setiap satu poin perubahan pada kedekatan terhadap partai politik, hal tersebut akan berpengaruh pada positif terhadap kesiadaan warga negara untuk menjadi pengawas pemilu. Semakin seseorang dekat dengan partai politik, semakin seseorang tersebut akan bersedia untuk menjadi pengawas pemilu.



Figur 3. Bivariate Statistik

Analisa OLS (tabel 2) menunjukkan hal yang sama dengan analisa bivariate (figur 3). Pada model 1, setiap peningkatan poin dari kedekatan dengan partai politik secara statistik sangat signifikan sebesar 99,9 persen meningkatkan poin sebesar 0.198 terhadap kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu (Adj R: 0.013, n: 500). Hal yang sama terdapat pada model 2, ketika variabel kontrol dimasukkan berupa tingkat pendapatan, pendidikan, dan usia. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor kedekatan terhadap partai politik secara statistik sangat berpengaruh, ditandai dengan perubahan satu poin pada kedekatan terhadap partai politik akan berpengaruh sebesar 0.219 terhadap kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu (Adj R: 0.046, n: 500). Hal lain pada model 2 yang berpengaruh pada kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu adalah usia, hanya saja semakin bertambah satu poin dalam variabel usia, hal tersebut berpengaruh negatif terhadap kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu dengan -0.096 poin. Hal ini berarti semakin tua seseorang, maka semakin enggan untuk terlibat menjadi pengawas pemilu.

Pada model 3, yakni ketika variabel kontrol ditambahkan dengan penilaian terhadap demokrasi dan intesitas diskusi politik. Hasil menunjukkan bahwa kedekatan terhadap partai politik tetap berpengaruh signifikan (signifikan secara statistik) terhadap kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu. Setiap perubahan satu poin pada kedekatan dengan partai politik berpengaruh

terhadap kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu sebesar 0.228 poin (Adj R: 0.042, n: 467). Hal yang sama seperti model 2, untuk variabel usia memiliki pengaruh kuat terhadap kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu, setiap satu poin perubahan pada variabel usia, berpengaruh pada -0.088 poin pada kesiediaan menjadi pengawas pemilu.

**Tabel 2. Linear Regression Model**

	Variabel Dependen (Kesiediaan Menjadi Pengawasan Pemilu)		
	(1)	(2)	(3)
Kedekatan dengan	0.198***	0.219***	0.228***
Partai Politik	(0.071)	(0.070)	(0.075)
Tingkat Pendapatan		0.058	0.054
		(0.039)	(0.040)
Tingkat Pendidikan		0.050*	0.045
		(0.030)	(0.032)
Usia		-0.096**	-0.088**
		(0.040)	(0.043)
Penilaian Demokrasi			0.082
			(0.072)
Intensitas Diskusi Politik			0.055
			(0.037)
Constant	0.431***	0.374*	-0.041
	(0.057)	(0.196)	(0.324)
<b>Observations</b>	500	500	467
<b>R2</b>	0.015	0.053	0.054
<b>Adjusted R2</b>	0.013	0.046	0.042
<b>Residual Std. Error</b>	0.764 (df = 498)	0.751 (df = 495)	0.765 (df = 460)
<b>F Statistic</b>	7.746*** (df = 1; 498)	6.989*** (df = 4; 495)	4.389*** (df = 6; 460)

Note:

\* $p < 0.1$ ; \*\* $p < 0.05$ ; \*\*\* $p < 0.01$

Secara umum, hasil analisa regresi menunjukkan bahwa semakin seseorang dekat dengan partai politik, maka semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk bersedia menjadi pengawas pemilu. Adapun penilaian terhadap demokrasi dan intensitas diskusi politik tidak menjadi faktor yang menjelaskan kesiediaan untuk menjadi pengawas pemilu. Pada kajian ini, *robustness* dari model coba kami lakukan dengan menguji variabel kedekatan terhadap partai politik dengan tiga model yang berbeda. Temuan ini menegaskan bahwa semakin seseorang terekspose pada politik, terutama dekat dengan partai politik dan ketika sosialisasi politik dilakukan secara terus menerus, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk terlibat di dalam pemilu. Dengan kata lain, dalam hal ini  $H_0$  ditolak, mengingat terdapat relasi yang kuat antara kedekatan dengan partai politik dan kesiediaan menjadi pengawas pemilu.

## Kesimpulan

Tulisan singkat ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman di D.I.Y, semakin seseorang memiliki kedekatan dengan partai politik, maka semakin seseorang tersebut memiliki keinginan terlibat dalam pemilu. Kajian singkat ini hendak memberikan temuan empiris terkait dengan pengaruh sosialisasi politik -kedekatan dengan partai politik- dengan keinginan warga untuk terlibat dalam pemilu, meski demikian model dalam kajian ini masih perlu untuk dievaluasi terutama apabila terdapat variabel lain yang perlu untuk dimasukkan ke dalam model statistik (persoalan *omitted variable bias*). Meskipun terdapat keterbatasan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memantik diskusi dan kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan kesiediaan warga negara untuk menjadi pengawas pemilu.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, secara praktis perlu untuk mendorong keaktifan politik warga di luar afiliasi dengan partai politik. Organisasi pegiat pemilu yang relatif otonom dari partai dapat menjadi peluang bagi keterlibatan warga negara untuk bersedia menjadi pengawas pemilu. Intensitas diskusi dan keterbukaan terhadap informasi politik saja tidak akan cukup, perlu kedekatan dengan organisasi yang berhubungan dengan kehidupan politik dari hari ke hari. Untuk hal ini, perlu untuk kajian lain dengan data set yang memumpuni dari aspek reliabilitas dan validitas guna mendapatkan bukti empiris yang memadai.

Salah satu keterbatasan dalam studi ini ada pada model statistik yang tidak mengeksplorasi apakah responden merupakan bagian atau menjadi anggota partai politik atau tidak. Pertanyaan ini tidak tereksplorasi atau tidak tersedia dalam data set yang ada. Dengan kata lain, tingkat keterlibatan individu kepada pada partai perlu untuk diuji pada kajian yang lain. Perlu pula untuk melakukan uji dengan data set yang berbeda

dan skala yang berbeda, semisal melakukan uji dengan skala nasional. Hal ini akan mendorong pengayaan terhadap kajian-kajian yang mencoba untuk mengeksplorasi penjelasan mengapa seseorang hendak berpartisipasi dalam pemilu dengan menjadi pengawas pemilu. Harapannya, temuan ini dapat memantik kajian-kajian serupa dengan fokus pada apa faktor yang mendorong seseorang untuk bersedia menjadi pengawas pemilu.

## Daftar Pustaka

- Ansyari, I., Harsasto, P., & Fitriyah. (2019). Article Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi Irvan Ansyari\* Priyatno Harsasto. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 01(01), 12–23. [www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS](http://www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS).
- Ardipandanto, A. (2017). Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat (The Election of Governor of DKI Jakarta 2017: Candidate Politics Strategy). *Kajian*, 22(1), 15–31.
- Baldassarri, D., & Bearman, P. (2007). Dynamics of Political Polarization. *American Sociological Review*, 72(5), 784–811. <https://doi.org/10.1177/000312240707200507>.
- Crepaz, M. M. L. (1990). The impact of party polarization and postmaterialism on voter turnout: A comparative study of 16 industrial democracies. *European Journal of Political Research*, 18(2), 183–205. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1990.tb00228.x>.
- Daryono, Y., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2020). Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27047>.
- Fitriyah. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Haryanti, A., & Pujilestari, Y. (2019). Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai Implementasi Penegakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 747–766.
- Hayat, N., & Nurhakki, N. (2022). Religion Identity And Political Polarization: How Does Labeling Make It Worst? *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(1), 51–66. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2715>.
- Imawan, R. P., & Ramadhan, D. (2021). Melampaui Politik Uang: Studi Kasus Peningkatan Partisipasi

- Politik dalam Pilwako Medan Tahun 2020. *JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU*, 3(2), 137–153.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.
- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2), 146–162. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>.
- Kudrnác, A. (2015). Theoretical perspectives and methodological approaches in political socialization research. *Sociologia*, 47(6), 605–624.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 393–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.
- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 1(2), 20–38. <https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/15>.
- Norris, P., Garnett, H. A., & Grömping, M. (2020). The paranoid style of American elections: explaining perceptions of electoral integrity in an age of populism. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 30(1), 105–125. <https://doi.org/10.1080/17457289.2019.1593181>.
- Prayogi, I. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 31–43. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>.
- Romli, L. (2019). Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 78–98. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17214>.
- Simandjuntak, D. (2012). Gifts and promises: Patronage democracy in a decentralised Indonesia. *European Journal of East Asian Studies*, 11(1), 99–126. <https://doi.org/10.1163/15700615-20120008>.
- Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, dan Kekuasaan Oligarki. *INNOVATIVE: Jpurnal of Social Science Research*, 3(6).
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*. Kemitraan.
- Wass, H. (2007). Generations and socialization into electoral participation in Finland. *Scandinavian Political*

*Studies*, 30(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00170.x>.

Widyastuti, T. R., Wardiyono, F. ., & Sutoyo, I. S. (2022). Is There a Political Dynasty in The Head Village Election with Family Ties Candidates?: A Case Study in Pliken Village Banyumas. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i1.35942>.